

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 2, May 2024, Halaman 121-131
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11362430>

Focus Group Discussion dan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

La Ega¹, Irwanto Irwanto^{2*}, Aryanto Boreel³, Johan Marcus Tupan⁴

¹ Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura. Ambon.

^{2,3} Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura. Ambon.

⁴ Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura. Ambon.

*Email korespondensi: irwantoshut@gmail.com

Abstrak

Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 merupakan langkah strategis dalam merumuskan visi pembangunan jangka panjang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045. Kegiatan FGD dan konsultasi publik dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu dan kebutuhan spesifik daerah, mengumpulkan informasi dan data akurat, mengembangkan solusi dan strategi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan. Metode pelaksanaan FGD dan konsultasi publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, LSM, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan masukan yang komprehensif sehingga rencana yang dihasilkan lebih akurat, inklusif, dan implementatif. Hasil FGD dan konsultasi publik mencakup identifikasi permasalahan seperti aksesibilitas dan konektivitas, keterbatasan infrastruktur, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan isu alih fungsi lahan. Visi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 adalah "Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Ekoagromarine", yang mencerminkan komitmen untuk pembangunan yang berfokus pada potensi sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Penyusunan RPJPD ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas. Pelaksanaan kegiatan ini akan melengkapi dokumen strategis RPJPD Kabupaten Buru Selatan yang mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan selama dua dekade mendatang.

Kata Kunci: *Focus Group Discussion, Konsultasi Publik, RPJPD, Visi Daerah, Misi Daerah.*

Abstract

Focus Group Discussion (FGD) and public consultations for the preparation of the Preliminary Draft Regional Long Term Development Plan (RPJPD) for South Buru Regency 2025-2045 are strategic steps in formulating a long-term development vision that is in line with the National Long Term Development Plan (RPJPN) 2025-2045 and Maluku Province RPJPD 2025-2045. FGD activities and public consultations are carried out to identify specific regional issues and needs, collect accurate information and data, develop solutions and strategies, and increase community participation and transparency in the planning process. The method for implementing FGDs and public consultations involves various stakeholders, including regional apparatus organizations (OPD), DPRD, community leaders, academics, business associations, NGOs and youth organizations. This activity aims to ensure comprehensive input so that the resulting plan is more accurate, inclusive and implementable. The results of FGDs and public consultations include identification of problems such as accessibility and connectivity, limited infrastructure, poverty, environmental damage and land conversion issues. The vision of South Buru Regency 2025-2045 is South Buru is Developed, Independent and Sustainable Ecoagromarine Based," which reflects a commitment to development that focuses on natural resource potential by considering social and environmental aspects. The preparation of this RPJPD is also expected to be able to increase economic competitiveness, the quality of human resources, and adaptive governance and integrity. Implementation of this activity will complement the South Buru Regency RPJPD strategic document which reflects the synergy between the government and the community in realizing inclusive and sustainable development over the next two decades.

Keywords: *Focus Group Discussion, Public Consultation, RPJPD, Regional Vision, Regional Mission.*

Article Info

Received date: 12 May 2024

Revised date: 19 May 2024

Accepted date: 28 May 2024

PENDAHULUAN

Indonesia akan memasuki dua dekade baru dalam pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2025-2045, sehingga telah dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah pendekatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 -2045 bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan melakukan penyelarasan dokumen RPJPD-nya dengan nasional. Visi dari dokumen RPJPN yang diberi nama Visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, oleh Provinsi Maluku telah dilakukan penyelarasan, dengan visi Emas Maluku 2045, yaitu “Maluku Maju, Inklusif, Berkelanjutan dan Berbasis Sumber Daya Kelautan”. Penataan kembali berbagai langkah-langkah pembangunan jangka panjang kedepan yang dituangkan dalam dua dokumen tersebut difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, didukung dengan penguatan landasan dan kerangka pembangunan yang menjamin terciptanya kondisi dan iklim implementasi yang kondusif dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 tahun (Mendagri, 2010). Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya. Tahapan penyusunan diawali dengan melakukan persiapan, menyiapkan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan PERDA. Tahapan dan perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan daerah, yaitu: 1) Dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan 2) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan daerah dan nasional (Mendagri, 2010, 2014, 2024).

Mengacu dari peraturan dan perundang-undangan yang ada serta dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi, maka substansi dari RPJPD Kabupaten Buru Selatan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan. Visi menggambarkan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa misi dan dijabarkan pentahapannya melalui berbagai strategi serta dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan perumusan dan penyusunan RPJPD dilakukan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 adalah langkah strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah ini. Rencana ini harus selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045 untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan yang komprehensif dan inklusif.

Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik RPJPD bertujuan untuk mengidentifikasi isu dan kebutuhan spesifik, pengumpulan informasi dan data yang akurat, pengembangan solusi dan strategi, peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan dengan membuka ruang bagi partisipasi publik serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Rachmat, Sutrisno, & Silitonga, 2023; Sitorus & Yanthy, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelaksanaan *Focus Group Discussion* dan konsultasi publik penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga rencana yang dihasilkan lebih akurat, inklusif, dan implementatif (Escalada & Heong, 2014).

Kegiatan *Focus Group Discussion* dan konsultasi publik penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 dilaksanakan pada Ruang Aula Lantai II Kantor Bupati Buru Selatan. Berikut adalah tanggal pelaksanaan dan beberapa metode yang digunakan dalam

pelaksanaan focus group discussion dan konsultasi publik (Rachmat et al., 2023; Safiuddin, Agus, Maharani, & Firdamayanti, 2023; Sitorus & Yanthy, 2022).

Tabel 1. Nama Kegiatan. Tanggal Pelaksanaan, Peserta dan Metoda Pelaksanaan

Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Metoda Pelaksanaan
<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	25 Maret 2024	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buru Selatan.	Ceramah, Presentasi dan Diskusi, Tiap OPD menyampaikan permasalahan dan isu yang terkait bidang pekerjaannya.
Konsultasi Publik	26 Maret 2024	OPD Kabupaten Buru Selatan, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, LSM, Organisasi Kepemudaan, Wartawan dan pemangku kepentingan terkait.	Ceramah, Presentasi dan Diskusi, Semua stakeholder menyampaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten di seluruh jajaran pemerintah daerah. Sedangkan pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga rencana yang dihasilkan lebih akurat, inklusif, dan implementatif.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, pandangan, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai isu-isu dan kebutuhan pembangunan daerah. FGD melibatkan diskusi terarah yang difasilitasi oleh moderator, dimana sekelompok orang dengan latar belakang atau kepentingan yang relevan berkumpul untuk berbicara tentang topik tertentu yang berkaitan dengan RPJPD (Marikena & Setiawannie, 2022; Rismawati et al., 2023).

FGD dalam rangka penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2025-2045 diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2024. Acara ini bertujuan untuk membahas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar. 1. Kegiatan FGD Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan.
(a) Sambutan Bupati Buru Selatan, (b) Moderator dan Narasumber. (c) Peserta FGD,
(d) Penyampaian Permasalahan, (e) Penandatanganan Berita Acara, (f). Foto Bersama.

Pembukaan Acara dimulai dengan sambutan dari Ibu Hj. Safitri Malik Soulisa, S.IP, M.Si, sebagai Bupati Buru Selatan. Ibu Hj. Safitri Malik Soulisa dalam sambutannya mengatakan rancangan awal RPJPD Bursel berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selain itu Bupati menyampaikan pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. FGD ini sebagai langkah untuk merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Buru Selatan dalam periode 20 tahun kedepan. Menurut Bupati, untuk mencapai visi ini, perlu memfokuskan perencanaan dan implementasi pembangunan kita pada sektor-sektor yang strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan.

Moderator dalam FGD ini adalah Bpk. Melkior Solisa, S.IP., M.Si, selaku Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan. Narasumber Bpk. Prof. Dr. Ir. La Ega, MSi, seorang pakar yang juga merupakan anggota Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045, diundang sebagai narasumber utama. Beliau memberikan paparan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Buru Selatan dalam jangka panjang.

Permasalahan yang dibahas dalam pertemuan ini, sebagai tantangan yang harus diatasi dalam perencanaan jangka panjang di Kabupaten Buru Selatan, adalah:

1. Aksesibilitas dan Konektivitas: Kendala dalam transportasi dan komunikasi yang menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kurangnya infrastruktur dasar yang memadai seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
3. Kemiskinan: Tingkat kemiskinan yang tinggi dan strategi penanggulangannya.
4. Kerusakan Lingkungan: Tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
5. Daerah Rawan Bencana: Identifikasi dan penanganan daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam.
6. Alih Fungsi Lahan: Isu konversi lahan pertanian dan hutan menjadi lahan non-produktif yang dapat mengancam ketahanan pangan dan ekosistem.

Penutup dari kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara FGD Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045. Berita acara ini mencerminkan komitmen dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang lebih maju, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui FGD ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara semua pihak terkait untuk merumuskan rencana pembangunan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Konsultasi Publik

Konsultasi publik dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merancang, menilai, dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan jangka panjang yang akan dijalankan di wilayah tersebut (Escalada & Heong, 2014; Safiuddin et al., 2023; Sitorus & Yanthy, 2022). Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsultasi publik dalam penyusunan RPJPD yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas

pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan (Iswari, Alri, & Mira, 2020; Rachmat et al., 2023).

Pelaksanaan Konsultasi Publik Pada tanggal 26 Maret 2024 dibuka oleh Bupati Buru Selatan Ibu Hj. Safitri Malik Soulisa, S.IP, M.Si. dengan pemukulan tifa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan rencana pembangunan yang lebih komprehensif dan inklusif.



Gambar. 2. Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan.
(a) Pembukaan oleh Bupati Buru Selatan, (b) Moderator dan Narasumber. (c) OPD Bursel,
(d) Masyarakat dan LSM, (e) Penandatanganan Berita Acara, (f). Foto Bersama.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beliau juga menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan dan menindaklanjuti setiap masukan yang konstruktif.

Moderator dalam kegiatan ini adalah Bpk Ir. Bob Rachmat, MSi, dari Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan. Dengan pengalamannya dalam bidang pembangunan daerah, Bpk Ir. Bob Rachmat, MSi memandu jalannya diskusi dengan efektif, memastikan semua isu penting dapat dibahas secara mendalam. Sebagai narasumber utama adalah Bpk Prof. Dr. Ir. La Ega, MSi, seorang pakar pembangunan dan anggota Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045. Beliau memaparkan kondisi terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Buru Selatan dalam jangka panjang.

Permasalahan yang dibahas dalam konsultasi publik penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan, di antaranya:

1. Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Kecamatan: Upaya peningkatan infrastruktur transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar.
3. Keakuratan Data Pembangunan dari BPS: Pentingnya data yang akurat untuk perencanaan yang tepat sasaran.
4. Stunting: Program penanggulangan stunting untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak.
5. Pemasaran Produk Pertanian dari Masyarakat: Strategi peningkatan nilai tambah dan akses pasar bagi produk pertanian lokal.
6. Investasi Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa: Peluang investasi dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
7. Pembangunan Pendidikan: Rencana peningkatan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

8. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Program peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.
9. Restorasi Justice dengan Kearifan Lokal: Pendekatan keadilan restoratif yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal.
10. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Strategi peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan daerah.
11. Pengembangan Destinasi Pariwisata: Rencana pengembangan destinasi wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan.
12. Penguatan Peran Pemuda: Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah.
13. Kewenangan Pusat dan Daerah: Sinergi antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
14. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Optimalisasi peran BUMD dalam mendukung ekonomi lokal.
15. Perusahaan Air Dalam Kemasan: Pengembangan perusahaan air minum dalam kemasan sebagai salah satu sumber PAD.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045. Penandatanganan ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang lebih maju dan berkelanjutan. Melalui konsultasi publik ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

Hasil Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 merupakan dokumen strategis yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Penyusunan dokumen ini penting untuk memastikan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif, serta untuk mencapai visi dan misi daerah yang sejalan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 menyebutkan bahwa Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan (Mendagri, 2024). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah:

1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif;
3. pendekatan politis;
4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integratif; dan
7. pendekatan spasial

Penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Buru Selatan, yaitu modal dasar atau potensi yang dimiliki, tren perkembangan global, perubahan iklim, daya tampung, daya dukung dan pencapaian pembangunan serta tantangan yang dihadapi sebelumnya. Berpedoman pada semua kondisi tersebut dan dengan memperhatikan arah, landasan dan kerangka transformasi pembangunan, serta sasaran dari RPJPN 2025 – 2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025 – 2045, maka dalam RPJPD Buru Selatan 2025 – 2045 dirumuskan 5 sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai sebagai acuan untuk penyusunan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMD pada setiap tahap pembangunan. Sasaran pencapaian tersebut adalah: (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) daya saing SDM dan perkembangan wilayah meningkat, (4) pemerintahan yang berintegritas dan adaptif, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Perumusan Visi Buru Selatan 2045 dilakukan melalui pendalaman dan kajian kondisi saat ini, modal dasar pembangunan yang dimiliki, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi selama 20

(dua puluh) tahun ke depan, memperhatikan visi Indonesia 2045 dan visi Maluku 2045, visi RPJPD dan RPJMD Buru Selatan sebelumnya serta pelaksanaan diskusi kelompok yang terfokus. Atas pendalaman, kajian dan serangkaian diskusi yang dilakukan, maka dirumuskan visi Buru Selatan 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

VISI Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2045

“Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Ekoagromarine”

Visi yang dirumuskan tersebut memberi pesan kepada seluruh pelaksana pembangunan dan masyarakat bahwa diperlukan partisipasi aktif dan komitmen yang kuat dari semua pihak agar apa yang direncanakan dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi dan transparan sehingga dapat dicapai hasil pembangunan yang holistik dan berkesinambungan. Pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat melalui pengembangan sumber daya yang dimiliki termasuk keragaman budaya dan warisan sejarah serta memelihara ekosistem lingkungan. Penjelasan rinci mengenai Visi Buru Selatan 2025 – 2045, sebagai berikut:

- **Maju**, mencerminkan capaian sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan kualitas hidup yang tinggi, ekonomi daerah berdaya saing yang didukung oleh kehidupan sosial dan budaya yang maju serta pada lingkungan alam yang lestari.
- **Mandiri**, mencerminkan pencapaian pembangunan telah mampu secara internal dapat melayani dan memenuhi sejumlah kebutuhan penting masyarakat sehingga memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai perubahan situasi yang dihadapi.
- **Berkelanjutan**, menggambarkan bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilaksanakan dan dicapai telah mempertimbangkan dan menerapkan kaidah pelestarian lingkungan, baik dari aspek keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- **Berbasis Ekoagromarine**: Memberi penekanan bahwa pembangunan Buru Selatan kedepan akan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara seimbang dan memperhatikan aspek sosial, salah satu yang utama adalah sumber daya lahan pertanian dan laut. Kedua sumber daya ini, dominan dimanfaatkan masyarakat Buru Selatan sebagai modal utama untuk menopang ekonomi keluarga. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Terkait kondisi iklim, saat ini dan kedepan secara global telah terjadi perubahan iklim yang menuju pada kondisi yang ekstrim yang dikenal secara umum sebagai *climate change*, yaitu kejadian El Nino dan La Nina. Para ahli klimatologi dan lingkungan telah menyatakan bahwa bila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan dan pengurangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, maka resiko perubahan iklim ekstrim akan terus meningkat. El Nino yang dalam bahasa Spanyol adalah lelaki (panas), menggambarkan bahwa pada kondisi ini akan terjadi bencana kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, kekurangan air, kebakaran hutan dan kegagalan panen. Sedangkan La Nina yang dalam Bahasa Spanyol adalah perempuan (dingin), menggambarkan kondisi yang sebaliknya, yaitu akan terjadi hujan ekstrim berkepanjangan sehingga menimbulkan bencana banjir, erosi dan tanah longsor. Mengantisipasi kondisi tersebut maka Visi RPJPD Kabupaten Buru Selatan 20 tahun kedepan menekankan pada basis Ekoagromarine.

Sasaran Visi Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2045 dirumuskan selaras dengan sasaran visi Indonesia dan Maluku 2025 – 2045. Terwujudnya Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Ekoagromarine akan tercermin dalam 5 sasaran visi yang telah diprediksi berdasarkan acuan data capaian pembangunan sebelumnya. Hasil prediksi sasaran tersebut yang kemudian disandingkan dengan sasaran Indonesia dan Maluku 2045 seperti terlihat pada Tabel berikut

- **Sasaran pertama**. Pendapatan per kapita diperkirakan meningkat dari Lower Middle Income tahun 2025 sebesar Rp.22.5 Juta) menjadi Upper Middle Income (tahun 2045 sebesar Rp.56.7 -61.2 juta). Capaian tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya kontribusi PDRB industri pengolahan di Buru Selatan sebesar 11.56 % dengan dukungan pemanfaatan sumber daya kelautan yang meningkat.
- **Sasaran kedua**, adalah usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka ketimpangan. Baseline di tahun 2025 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Buru Selatan masih tinggi, yaitu diprediksikan berada pada angka 13.65% dan di tahun 2045 ditarget menurun mencapai 0 - 5%. Selain itu, Tingkat ketimpangan pada tahun 2025 sebesar 0.27 pada tahun 2045 ditarget menurun mencapai 0.15 – 0.25.

- **Sasaran ketiga**, adalah usaha untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan perkembangan wilayah. Hasil prediksi menetapkan baseline 2025 untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,20. Tingkat kemajuan wilayah, yang dideteksi melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah, diprediksi pada baseline di tahun 2025 adalah 3,08 dan pada tahun 2045 akan meningkat mencapai 4,07.
- **Sasaran keempat**, adalah pemerintah yang berintegritas dan adaptif. Diharapkan kedepan pemerintah daerah akan lebih lincah dan transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan lebih lincah dalam merespons, meyakinkan melalui data serta bernegosiasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi.
- **Sasaran kelima**, adalah menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission. Mewujudkan Buru Selatan menjadi daerah yang maju, perlu diwujudkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat dan semua stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 merupakan gambaran kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Ekoargomarine. Gambaran hubungan misi pembangunan dan sasaran pokok dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. 2. Misi Pembangunan Buru Selatan 2025-2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan

No	Misi Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045	Sasaran Pokok
1	Mewujudkan Pembangunan Sosial Berkualitas, Merata, Adaptif, dan Inklusif	1.1. Mantapnya layanan kesehatan yang profesional, inklusif, merata dan berkelanjutan 1.2. SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif 1.3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan mendekati nol (0) persen
2	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Tangguh dan Berkelanjutan	2.1. Struktur ekonomi Buru Selatan berubah secara gradual dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier yang mendorong peningkatan pendapatan daerah menuju kelas menengah atas (<i>Upper Middle Income</i>) di Tahun 2045 2.2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tetap menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045 2.3. Terwujudnya ekosistem digital di seluruh sektor di wilayah Buru Selatan tahun 2045 2.4. Meningkatnya integrasi ekonomi di tingkat domestik dan global 2.5. Berkembangnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah terwujudnya kota dan desa yang maju, inklusif dan berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045
3	Mewujudkan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Adaptif	3.1. Regulasi adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, responsif, adaptif dan kolaboratif di Buru Selatan tahun 2045
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Koordinasi Serta Sinergitas	4.1. Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkapasitas, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia di Buru Selatan tahun 2045

No	Misi Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045	Sasaran Pokok
		4.2. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah 4.3. Ketangguhan Diplomasi Daerah dan Penyelesaian gangguan trantibun meningkat di Buru Selatan Tahun 2045
5	Membangun Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologis Yang Menjamin Kualitas Hidup	5.1. Menguatnya peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan Buru Selatan tahun 2045 5.2. Maju dan lestarnya kebudayaan untuk memperkuat karakter, jati diri masyarakat Buru Selatan, meningkatnya kesejahteraan rakyat 5.3. Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender di Buru Selatan Tahun 2045 5.4. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045 5.5. Terwujudnya Buru Selatan yang memiliki ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di tahun 2045 5.6. Daerah yang berketahanan iklim dan bencana secara berkelanjutan di Buru Selatan pada tahun 2045
6	Membangun Kewilayahan Yang Merata dan Sejahtera	6.1. Pemerataan pembangunan antar wilayah di Buru Selatan meningkat pada Tahun 2045
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang mendukung ekoagromarine	7.1. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan 7.2. Tersedianya sarana dan prasarana dasar yang bermutu Yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan
8	Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan	8.1. Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang inovatif di Buru Selatan di Tahun 2045

Dampak Kegiatan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 memiliki berbagai dampak yang signifikan. Dampak-dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik itu dalam hal kualitas perencanaan, partisipasi masyarakat, hingga keberhasilan implementasi rencana pembangunan (Escalada & Heong, 2014; Rachmat et al., 2023; Sitorus & Yanthy, 2022). Berikut adalah beberapa dampak utama dari kedua kegiatan tersebut:

a. Dampak Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

1. Kualitas Perencanaan yang Lebih Baik:

Informasi Mendalam dan Relevan: FGD memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam dan relevan dari berbagai pemangku kepentingan, yang dapat memperkaya dan memperbaiki kualitas RPJPD. Identifikasi Isu Spesifik: Melalui diskusi yang terfokus, FGD membantu mengidentifikasi isu-isu spesifik dan permasalahan lokal yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode lain.

2. Pengembangan Solusi yang Inovatif:

Brainstorming dan Kolaborasi: FGD memungkinkan brainstorming dan kolaborasi antar peserta, yang dapat menghasilkan solusi inovatif dan strategi pembangunan yang efektif. Pemahaman

Perspektif Beragam: Mengumpulkan perspektif yang beragam membantu dalam merancang solusi yang lebih komprehensif dan inklusif.

3. Pembentukan Konsensus dan Komitmen:

Konsensus Pemangku Kepentingan: FGD membantu membangun konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan mengenai prioritas pembangunan dan langkah-langkah yang harus diambil. Peningkatan Komitmen: Melibatkan pemangku kepentingan dalam FGD meningkatkan komitmen seluruh pihak untuk mendukung dan melaksanakan RPJPD.

b. Dampak Kegiatan Konsultasi Publik

1. Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:

Inklusi Masyarakat: Konsultasi publik memastikan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangannya. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rencana pembangunan jangka panjang dan dampaknya di kemudian hari.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Transparansi Proses Perencanaan: Konsultasi publik meningkatkan transparansi proses perencanaan, sehingga masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana keputusan diambil. Akuntabilitas Pemerintah: Meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat.

3. Legitimasi dan Dukungan Publik:

Legitimasi Kebijakan: RPJPD yang disusun melalui proses konsultasi publik memiliki legitimasi yang lebih tinggi karena didukung oleh masukan dari masyarakat luas. Dukungan Implementasi: Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi RPJPD karena masyarakat merasa memiliki dan mendukung rencana tersebut.

4. Penyesuaian dan Relevansi Rencana:

Penyesuaian Kebijakan: Masukan dari konsultasi publik memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Relevansi Rencana: Memastikan bahwa RPJPD relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Buru Selatan.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD dan konsultasi publik dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas perencanaan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta keberhasilan implementasi rencana pembangunan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa RPJPD yang disusun tidak hanya komprehensif dan inklusif, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

1. Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah metode penting untuk mengumpulkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu-isu dan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui diskusi terarah yang dipandu oleh moderator, FGD melibatkan sekelompok orang dengan latar belakang dan kepentingan yang relevan untuk berbicara tentang topik yang berkaitan dengan RPJPD.
2. Konsultasi publik dalam penyusunan RPJPD adalah proses yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk merancang, menilai, dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan jangka panjang. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak, konsultasi publik membantu memastikan bahwa RPJPD yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memiliki dukungan yang luas. Pelaksanaan konsultasi publik ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
3. Penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 akan menghasilkan dokumen strategis yang mengarahkan pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial, berpedoman pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-

2045. Penyusunan RPJPD memperhatikan kondisi internal dan eksternal, potensi daerah, tren global, perubahan iklim, serta tantangan yang dihadapi.
4. Visi Buru Selatan 2025-2045 adalah "Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Ekoagromarine." Visi ini menekankan partisipasi aktif, sinergi, dan transparansi dalam pembangunan, serta mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat melalui pengembangan sumber daya, keragaman budaya, dan pelestarian ekosistem lingkungan.

REFERENSI

- Escalada, M., & Heong, K. (2014). Focus group discussion. *Research Gate Journal*, 3, 178.
- Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213-231.
- Marikena, N., & Setiawannie, Y. (2022). Focus Group Discussion Kualitas Air Danau Toba dalam Penentuan Status Trofik Danau Toba. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 1(3), 363-370.
- Mendagri. (2010). *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Mendagri. (2014). *Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015*. Jakarta.
- Mendagri. (2024). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*. Jakarta.
- Rachmat, R., Sutrisno, E., & Silitonga, M. S. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (PermenPANRB nomor 16 tahun 2017). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 1-10.
- Rismawati, R., Alfianti, S. A., Hasanah, I., Riskiyono, S., Wardhana, D. I., & Setyowati, T. (2023). Sosialisasi dan Focus Group Discussion Pencegahan Serta Penanganan Stunting Sejak Dini di Desa Sumberanyar Kabupaten Bondowoso. *Journal of Community Development*, 4(2), 173-180.
- Safiuddin, S., Agus, J., Maharani, M., & Firdamayanti, F. (2023). Forum Konsultasi Publik dengan Tema: Data Program Perlindungan Sosial dan Pembangunan Masyarakat. *Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- Sitorus, Y. L. M., & Yanthy, N. O. (2022). Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion pada Kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua. *Jurnal Abdimas Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 39-43.